



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH RAPAT KERJA
KOMISI V DPR RI
DENGAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL,
DAN TRANSMIGRASI RI**

- Tahun Sidang : 2024-2025
Masa Persidangan : I
Rapat Ke- : 4
Jenis Rapat : Rapat Kerja Komisi V DPR RI dengan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI.
Sifat Rapat : Terbuka
Hari, Tanggal : Selasa, 27 Agustus 2024
Waktu : Pukul 13.32--14.20 WIB
Tempat : Ruang Rapat Komisi V DPR RI, (Ruang KK V) Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta
Acara : 1. Membahas RKA K/L TA 2025 Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam Nota Keuangan RAPBN TA 2025;
2. Lain-lain.
Ketua Rapat : Ir. Ridwan Bae (Wakil Ketua Komisi V DPR RI/F-PG)
Sekretaris Rapat : Nunik Prihatin Budiastuti, S.H., (Kepala Bagian Sekretariat Komisi V DPR RI)
Hadir : A. Pimpinan
1. Ir. Ridwan Bae (Wakil Ketua Komisi V DPR RI/F-PG)

B. Anggota DPR RI:

**FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA
PERJUANGAN (F-PDI PERJUANGAN)**

2. Mochamad Herviano
3. Sarce Bandaso Tandiasik, S.H., M.H.
4. Harvey B. Malaihollo

FRAKSI PARTAI GOLKAR (F-PG)

5. Drs. Hamka B Kady, M.S.
6. H. Tubagus Haerul Jaman, S.E.

**FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA
(F-GERINDRA)**

-

FRAKSI PARTAI NASDEM (F-NASDEM)

-

FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (F-PKB)

7. H. Irmawan, S.Sos., M.M.

FRAKSI PARTAI DEMOKRAT (F-PD)

-

FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (F-PKS)

-

FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL (F-PAN)

8. Hj. Hanna Gayatri, S.H.

9. Athari Ghauthi Ardi

FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (F-PPP)

10. Dr. H. Muh Aras, S.Pd., M.M.

- Izin : 1. Robert Rouw (Wakil Ketua Komisi V DPR RI/F-Nasdem)
2. Bob Andika Mamana Sitepu, S.H. (F-PDI Perjuangan)
3. Ir. Sudjadi (F-PDI Perjuangan)
4. Ir. Effendi Sianipar (F-PDI Perjuangan)
5. Cen Sui Lan (F-PG)
6. Ir. Sumail Abdullah (F-Gerindra)
7. Ir. Eddy Santana Putra, M.T. (F-Gerindra)
8. Drs. Mulyadi, M.MA. (F-Gerindra)
9. Drs. H. Tamanuri, M.M. (F-Nasdem)
10. H. Syarief Abdullah Alkadrie, S.H., M.H. (F-Nasdem)
11. Drs. H. Soehartono, M.Si. (F-Nasdem)
12. Sri Wahyuni (F-Nasdem)
13. Drs. Fadholi, M. Ikom. (F-Nasdem)
14. H. Dedi Wahidi, S.Pd. (F-PKB)
15. H. An'in Falachudin Mahrus (F-PKB)
16. Neng Eem Mrhamah Zulfa Hiz (F-PKB)
17. Ir. H. Ishak Mekki, M.M. (F-PD)
18. Ir. Sigit Sosiantomo (F-PKS)
19. Dr. H. Syahrul Aidi Maazat, Lc., M.A. (F-PKS)
20. H. Boyman Harun, S.H. (F-PAN)
- Undangan : 1. Dr. (H.C.) Drs. H. Abdul Halim Iskandar, M.Pd. (Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI).

2. Pejabat Eselon I Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI.
3. Jajaran Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI.

h

Jalannya Rapat:

KETUA RAPAT (IR. RIDWAN BAE/WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI/F-PG):

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Selamat siang dan
Salam sejahtera buat kita semua.

Yang terhormat Pimpinan Anggota Komisi V DPR RI,
Yang terhormat Menteri Desa PDT dan Transmigrasi beserta jajarannya,
serta hadirin yang kami hormati,

Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, karena tentu karena berkat-Nya, kebesaran-Nya, sehingga kita semua bisa hadir pada kesempatan kali ini, untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab kita dengan keadaan sehat walafiat.

Menurut laporan sekretariat, daftar hadir Anggota Komisi V DPR RI telah ditandatangani sebanyak 15 orang, tetapi mungkin mereka lagi ke ruangan masing-masing, sementara mereka menuju ke ruangan ke ruangan rapat sini dan terdiri dari 5 (lima) unsur Fraksi, sehingga memenuhi kuorum.

Oleh karena itu, sebagaimana ketentuan diatur dalam Pasal 281 Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib, izinkan kami membuka rapat pada hari ini, dan sesuai ketentuan Pasal 276 ayat (1), rapat kerja ini kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**(RAPAT DIBUKA PUKUL 13.32 WIB)
(RAPAT DINYATAKAN TERBUKA UNTUK UMUM)
(KETOK PALU 1 KALI)**

Terima kasih dan penghargaan kami sampaikan kepada Menteri Desa PDT, dan Transmigrasi beserta jajarannya yang telah memenuhi undangan kami pada hari ini.

Menindaklanjuti surat dari Pimpinan Banggar DPR RI tanggal 10 Juni 2024, perihal Penyampaian Rancangan Jadwal Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Tanggung Jawab..., Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2023, dan Rancangan Jadwal Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tahun Anggaran 2025, maka hari ini Komisi V DPR RI melaksanakan Rapat Kerja dengan Menteri Desa PDT dan Transmigrasi dengan agenda:

1. Membahas RKA atau K/L tahun anggaran 2025 Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi dalam Nota Keuangan APBN tahun anggaran 2025. Dalam Nota Keuangan RAPBN tahun 2025, Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi memperoleh anggaran sebesar 2,31 triliun.

Alokasi anggaran tersebut digunakan untuk kegiatan prioritas seperti:

- Pembangunan atau rehabilitasi infrastruktur desa, daerah tertinggal, transmigrasi;
- Pengendalian penggunaan dana desa; dan
- Bantuan pengembangan desa wisata dan Badan Usaha Milik BUMDes.

Dalam kesempatan Raker ini, perlu kiranya kita bangun kesepahaman bersama, bahwa Rapat Kerja pada hari ini merupakan satu rangkaian yang tidak terpisahkan dengan pembicaraan pendahuluan RAPBN tahun anggaran 2025 yang telah kita laksanakan pada bulan Juni 2024 yang lalu.

Selain itu, sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD pada Pasal 98 ayat (2), dan ayat (3), serta Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Pasal 59 ayat (2) dinyatakan bahwa tugas Komisi dalam bidang anggaran meliputi di antaranya membahas dan menetapkan alokasi anggaran untuk fungsi dan program kementerian/lembaga yang menjadi mitra kerja Komisi.

Saudara-Saudara yang berbahagia,

Pada kesempatan rapat kerja ini, beberapa isu strategis yang perlu mendapat perhatian dari Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi antara lain:

1. Alokasi anggaran tahun 2025 harus dapat mendukung program prioritas nasional, dan target RPJMN untuk mendukung pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

2. Perlunya meningkatkan jumlah dan sebaran bantuan untuk desa wisata, pemberdayaan masyarakat di kawasan transmigrasi dan percepatan pelatihan bagi aparatur desa dalam rangka mendukung kemajuan dan kemandirian desa.

3. Kegiatan pemberdayaan masyarakat desa, misalnya melalui BUMDes yang telah dibentuk di desa, belum sepenuhnya mendorong pertumbuhan ekonomi, dan penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat desa. Oleh karena itu, sangat penting pendampingan berkaitan dengan peningkatan kapasitas pengelola BUMDes, peningkatan dukungan sarana prasarana, serta pelatihan inovasi produk yang pengelola BUMDes, bagi pengelola BUMDes.

Pimpinan, Anggota Komisi V DPR RI,
Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi yang kami hormati,

Demikian pengantar dari kami.

Selanjutnya kepada Menteri Desa PDT dan Transmigrasi untuk menyampaikan penjelasan dan kepada Pak Menteri.

Kami persilakan.

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI RI (DR. (HC) DRS. A. HALIM ISKANDAR, M.PD.):

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Selamat siang, dan
Salam Sejahtera untuk kita semua,
Shalom,
Om Swastiastu,
Namo Buddhaya,
Salam Kebajikan,

Yang kita hormati dan kita banggakan Para Pimpinan dan Anggota Komisi V DPR RI,

Pertama, saya ucapkan terima kasih atas kesempatan diberikan kepada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi untuk menghadiri rapat kerja pada hari ini yang terkait dengan rencana kerja anggaran Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Transmigrasi untuk tahun anggaran 2025.

Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati,

Tema RAPBN tahun 2025 adalah akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dimana di dalam upaya untuk untuk melakukan akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan ini, ada beberapa hal yang menjadi kebijakan dalam penyusunan rencana kerja anggaran kementerian dan lembaga tahun 2025, yang dituangkan dalam surat bersama antara Menteri PPN, Kepala Bappenas, dan Menteri Keuangan Nomor: S-612/MK.02/2024 dan B-490/D.8/PP.04.03/07 tahun 2024, hal: Pagu Anggaran Belanja Kementerian atau Lembaga dan Dana Alokasi Khusus Tahun 2025, dan Penyelesaian Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Lembaga Tahun Anggaran 2025, ada 2 hal:

1. Terkait dengan kegiatan prioritas nasional dan rinciannya di mana K/L mempersiapkan pelaksanaannya serta memastikan pencantumannya dalam rencana kerja anggaran kementerian dan lembaga tahun anggaran 2025. Apabila terdapat perubahan prioritas nasional dan rinciannya, juga perubahan tersebut dilakukan dengan persetujuan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dan Kementerian Keuangan.

2. Dalam meningkatkan kualitas belanja (*spending better*), dilaksanakan melalui antara lain:

1) Fokus pada prioritas dan orientasi pada hasil (*result based*).

2) Efisiensi belanja non-prioritas pusat dan daerah antara lain:

- Penajaman belanja barang, operasional, perjalanan dinas, paket *meeting* dan honor-honor ini dilakukan penajaman.
- Belanja modal difokuskan untuk mendukung transformasi ekonomi serta pembatasan pembangunan gedung dan pengadaan kendaraan dinas. Jadi harus di paling tidak diprioritaskan untuk yang kesekian ketika bicara terkait dengan pembangunan gedung dan pengadaan kendaraan dinas.
- Penajaman belanja yang diserahkan ke masyarakat atau pemerintah daerah.

Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati,

Tahun anggaran 2025 ini terjadi penyesuaian beberapa hal, yang pertama terkait dengan tidak disetujuinya permohonan *additional financing* oleh DJ PBR yaitu DJ PBR Kemenkeu karena pihak Lender (IFAD) menaikkan suku bunga pinjaman, akibat naiknya status Indonesia dari *middle income country* menjadi *upper middle income country*.

Nah, sehingga yang semula kita akan mendapatkan dana pinjaman 254.718.378.000 karena kenaikan suku bunga, maka DJ PBR Kemenkeu tidak menyetujui pinjaman itu. Nah, memperhatikan kondisi tersebut, maka pagu Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tahun 2025 menurun dari pagu indikatif yang semula sebesar Rp2.569.525.227.000,00 menjadi 2.314.806.849.000 pada pagu anggaran 2025 sesuai dengan nota keuangan RAPBN 2025.

Adapun rincian pagu anggaran per program tahun anggaran 2025:

1. Program Dukungan Manajemen, ini sebesar Rp667.684.582.000,00 kemudian;

2. Program Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi, Rp1.647.122.267.000,00 total untuk Rupiah murni, total Rp2.314.806.849.000,00 dimana Rupiah murni-nya Rp2.296.196.977.000,00 sedangkan hibah luar negeri-nya Rp18.608.872.000,00.

Sedangkan, rincian hibah luar negeri dan PNBP tahun anggaran 2025 yaitu untuk *investing in nutrition and early years phase II project* oleh *World Bank* Rp18.608.872.000,00.

Kemudian penerimaan negara bukan pajak Rp2.012.303.000,00.

Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati,

Adapun ketika kita lihat pagu anggaran tahun 2025 per unit kerja Eselon I, bisa kita laporkan:

- Inspektorat Jenderal, total pagu anggaran Rp29.426.946.000,00, pagu kebutuhan 2025 Rp46.550.000.000,00, *backlog* Rp17.123.054.000,00;
- Dirjen Pembangunan Desa dan Perdesaan, total pagu anggaran, Rp98.414.161.000,00, pagu kebutuhan-nya Rp484.940.000.000,00, *backlog* Rp386.525.839.000,00;
- Dirjen Pengembangan Ekonomi Dan Investasi Desa Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi, total pagu anggaran Rp66.259.996.000,00, pagu kebutuhan sebesar Rp523.500.000.000,00, *backlog* Rp457.240.000.000,00;
- Dirjen Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, pagu anggaran 2025 Rp60.868.508.000,00, pagu kebutuhan Rp120.000.000.000,00, *backlog* 59 miliar lebih.
- Dirjen Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi, total pagu anggaran Rp9.612.000.000,00, pagu kebutuhan 2025 Rp670.280.000.000,00, *backlog* 571 miliar 667 Rupiah sekian;
- Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, totalPagu Anggaran Rp1.595.720.000.000,00, kebutuhan Rp2.050.000.000.000,00, *backlog* Rp454.279.000.000,00;
- Sekretariat Jenderal, pagu anggaran Rp302.000.217.000,00, pagu kebutuhan Rp315.000.000.000,00 *backlog* 13 miliar. Anggaran di Sekretariat Jenderal meningkat karena tunjangan kinerja seluruh pegawai di kementerian sekarang dipusatkan di Sekretariat Jenderal; dan yang terakhir
- Badan Pengembangan dan Informasi Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, pagu anggaran tahun 2025 Rp63.286.000.000,00 pagu kebutuhan 2025 Rp168.500.000.000,00 sehingga total pagu anggaran 2025 sebesar Rp2.314.806.849.000,00 sedangkan pagu kebutuhan 2025, Rp4.379.570.000.000,00 sehingga *backlog* ada Rp2.064.763.151.000,00.

Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati,
Para Pimpinan dan Anggota Komisi V,

Sedangkan dari seluruh anggaran tadi, kalau kita lihat rancangan *output* prioritas tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang menurut saya sesuai dengan arahan Pimpinan Rapat, Pimpinan Komisi V tadi, ini harus dibahas secara detail supaya sesuai dengan arahan, masukan, dan pertimbangan dari seluruh Pimpinan dan Anggota Komisi V, sehingga dibutuhkan waktu khusus untuk *detailing* supaya betul-betul disepakati antara Komisi V dengan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian yang bisa kami laporkan, kurang lebihnya mohon maaf, mohon arahan saran dan masukan.

Terima kasih,

*Wallahul muwaffiq ila aqwamith thariq,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

KETUA RAPAT (IR. RIDWAN BAE/WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI/F-PG):

Terima kasih, Pak Menteri.

Walaupun singkat tetapi dapat dimengerti. Apalagi anggaran pedesaan kita ini turun lagi dari, bahkan *backlog*-nya hampir 100% dari 4 triliun lebih, cuma 2 triliun lebih yang dipenuhi. Memang ini PDT ini, hampir setiap tahun kita diperhadapkan dengan anggaran. Di sisi lain, banyak masyarakat yang berkehendak, bahkan pemerintah juga sebenarnya punya keinginan yang tinggi, bagaimana kita membangun negeri kita ini dari desa.

Fakta yang terjadi bahwa anggaran desa begitu sangat minim. Bukan main, dari 2,3..., 2,3 triliun ini, kalau gaji pegawai kita dan pendamping itu 1,5 triliun kurang lebih, maka berarti kurang lebih hanya 700 triliun yang dikelola, *eh* 700 miliar yang dikelola. *Nah*, kalau 700 miliar ini kurang lebih 75.000 desa, itu berapa saja yang bisa dikelola, apa bisa di, apa namanya disentuh.

Oleh karena itu, mungkin tadi sudah ada pembahasannya, apa gambarnya tahun 2025 itu, tinggal bagaimana disesuaikan dan yang kita harapkan bahwa walaupun sekecil itu, anggaran, anggaran pendapatan belanja kita, tetapi bisa bisa bermanfaat buat desa kita.

Baik.

Ini kita baru bertiga, ini karena yang lainnya ini, maaf Pak Menteri, jangan sampai Pak Menteri menganggap bahwa kita tidak memperhatikannya menjadi PDT, bukan demikian, karena tanggal ini adalah tanggal 27, dan sampai tanggal 29 itu semua orang banyak di Dapil, ke Dapil yang menghadapi Pilkada, pendaftaran mulai 27-29. Jadi waktu 3 hari ini, saya yakin pasti hampir semua komisi akan mendapati kondisi yang sama. Namun demikian, negara tidak boleh berhenti, rapat tidak boleh berhenti, tetap kita jalan.

Nah, kita percaya walaupun sedikit yang akan beri pendalaman, tapi kita percaya bahwa Pak Menteri dan seluruh jajarannya sudah bekerja maksimal untuk negeri ini, dan sudah memaparkan tadi persoalan anggaran dipersiapkan tahun 2025.

Silakan mungkin, masih ada, apa ada teman yang ingin berikan tanggapan?

Pak Aras, silakan Pak Aras.

F-PPP (DR. H. MUH ARAS, S.PD., M.M.):

Terima kasih, Pak Ketua.

Bismillahirrahmanirrahim.

Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Selamat siang dan
Salam sejahtera untuk kita sekalian.

Yang terhormat Pak Ketua dan teman-teman Anggota Komisi V,
Yang saya hormati Pak Menteri beserta seluruh jajaran,
dan seluruh hadirin yang berbahagia,

Saya langsung saja untuk terkait dengan RAPBN tahun anggaran 2025, ya saya melihat bahwa ternyata Kementerian Desa ini juga sudah berusaha mengusulkan semaksimal mungkin sampai Rp4 triliun, hanya saja memang yang terpenuhi hanya kurang lebih separuhnya. Jadi *backlog* dengan pagu anggaran kurang lebih sama. Artinya apa? bahwa sesungguhnya memang pemerintah menyiapkan anggaran untuk PDTT sangat terbatas, ya siapa tahu nanti diusulkan 5 triliun disetujui 2,5, atau usulkan aja, Pak, 10 triliun, sehingga bisa disetujui 5 triliun, kalau rumusnya setengah-setengah ya.

Nah, kemudian ini karena anggaran yang sudah sangat terbatas, barangkali harapan kami supaya jelas juga titahnya, atau jelas juga bekasnya di pedesaan, bisa menghindarkan banyak desa tertinggal menjadi sedikit lebih maju, tentu program-programnya jangan juga sekecil-kecil seperti begini, Pak.

Bayangkan misalnya sebagai contoh: pendampingan pembentukan desa inklusi dan sistem akuntabilitas sosial, dana di desa, itu 10 desa dengan anggaran hanya Rp1,15 miliar. Artinya, ini dibagi 10, berarti kan hanya kurang lebih Rp115 juta, ini dipakai pegawainya berapa? kemudian sampai ke masyarakat berapa? untuk kegiatan-kegiatannya apa? berapa kali pertemuan, dan seterusnya sehingga ini kan pasti juga akan bias, dan bisa jadi juga bekasnya *ndak* kelihatan ya, ya, diharapkan nanti ke depan bahwa betul-betul nanti diverifikasi, bidang-bidang mana yang perlu perhatian khusus dari Kementerian Desa difokuskan ke sana supaya setelah ditinggalkan program itu masih berbekas di tempat itu, ada peningkatan di status sosial, atau peningkatan ekonomi di masyarakat kita.

Sama juga seperti misalnya jalan dan jembatan, sekalian *ndak* usah di di Kementerian Desa, kasih aja di PUPR semua ya, ya supaya bisa lebih maksimal seperti *stunting* misalnya, bisa saja di Kementerian Kesehatan ya, karena anggaran Kementerian Kesehatan kan cukup tinggi di sana, sehingga Kementerian Desa fokus pada bagaimana masyarakat desa ini yang tertinggal, yang terisolasi, yang terkebelakang, bisa maju sedikit ya sehingga, betul-betul kehadiran Menteri Desa ini bisa memberikan warna bahwa, dengan hadirnya

h

Kementerian Desa, maka sekian desa yang tertinggal bisa mandiri, bisa naik statusnya.

Kemudian yang selanjutnya adalah tentu kita harapkan bahwa program-program yang sangat terbatas ini, dengan volume pegawai yang cukup besar, tentu kita harapkan bahwa lebih banyak anggaran yang harus diturunkan kepada masyarakat karena tujuan kita adalah membangun untuk masyarakat ya. Pegawai-pegawai yang misalnya yang terlalu gemuk, bisa dipertimbangkan di tempat-tempat strategis yang lain, supaya mereka bisa maksimal kerjanya. Misalnya, ngurusi satu kabupaten, yang dapat program hanya 5 desa misalnya, terus pegawai yang ngurusi itu sampai puluhan, ini kan tidak efektif ya. Mohon untuk menjadi pertimbangan bahwa program-program ini misalnya di kabupaten tertentu yang memang terisolir, terbelakang, terluar misalnya, difokuskan pembangunan kita di sana supaya mereka juga bisa menikmati pembangunan ini secara merata di sana ya.

Kalau misalnya hanya satu program, dua program, ya pasti bingung yang mana mau dikasih ya. Kita aja di Komisi V terkait dengan bedah rumah, kita bagi 10 per desa misalnya, atau 30 per desa, ternyata setelah selesai 30, ternyata disurvei kembali, masih ada 50 lagi, kasih 50, survei kembali, masih ada 50 lagi. Ini juga *ndak* habis-habis, apalagi kalau misalnya hanya satu atau dua ya.

Barangkali itu menjadi pertimbangan untuk bisa lebih fokus pada titik-titik tertentu yang memang harus di, di, apa namanya, ditangani oleh Kementerian Desa.

Barangkali hanya itu Pak Ketua, tambahan sedikit bahwa juga ini beberapa poin di dalamnya, masih terdapat indikasi penyalahgunaan dana desa. Ini tentu kita harapkan bahwa pendamping desa ini, betul-betul orang yang mengetahui teknis pengerjaan lapangan karena merekalah yang bertanggung jawab untuk membimbing, membina, mendampingi para kepala desa untuk menjalankan fungsi anggaran, dan pelaksanaan di lapangan ya, karena inilah yang menjadi jembatan bagi teman-teman yang lain dimanfaatkan untuk bagaimana menekan kepala desa dengan masalah-masalah yang dihadapi oleh mereka.

Jadi, masih teringat kemarin karena Pak Menteri juga ikut di kontestasi kemarin ya, kebetulan di Dapil saya juga ya ada yang bermitra dengan mereka. Jadi yang..., yang pihak APH itu melakukan pemeriksaan menjelang misalnya Pemilu, ini luar biasa tekanannya ya. Jadi mohon diminimalisir sekecil mungkin kekeliruan atau kesalahan sehingga tidak ada pintu masuk bagi teman-teman lain untuk menjadi terperiksa dan seterusnya, karena data yang ada sampai hari ini masih sangat tinggi, Pak.

Mudah-mudahan ke depan mereka semakin berpengalaman, dan semakin tahu bagaimana cara untuk memberikan apa namanya, pelaporan melaksanakan kegiatan di lapangan, dan terutama juga kinerja dan hasilnya,

tentu kita harapkan bisa lebih maksimal dan jelas apa namanya, nilai manfaatnya di tengah-tengah masyarakat desa. Barangkali begitu, Pak Ketua.

Terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.

KETUA RAPAT (IR. RIDWAN BAE/WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI/F-PG):

Walaikumsalam.

Terima kasih Pak Aras.

Ini saya sedikit nyambung persoalan pengawasan ini Pak Menteri, ini barangkali karena Bapak sebentar lagi akan jadi Anggota DPR, mungkin para Dirjenya ini harus jadi pikiran ini. Di lapangan itu memang, masih banyak hal yang terjadi yang perlu pengawasan ketat, terutamanya dana-dana desa yang kadang kala hubungan kepala desa dengan BPMD ya, itu juga kadang kala ada pungutan-pungutan, kadang kala ya, tidak semua daerah terjadi, tapi ada kabar ya, kita ini kan banyak teman juga kepala desa, banyak teman kepala desa, ada keluhan-keluhan. Kadang kala karena ketidakmampuan mereka, sumber daya manusia mereka begitu lemah. Nah kalau mereka mengurus apa namanya, mengurus bagian daripada perjalanan keuangan ini, kadangkala mereka juga harus dapat setoran-setoran tertentu.

Ini mungkin, kalau bisa dihilangkanlah. Sudah uang begitu kecil, terus dimanfaatkan salah lagi, melanggar hukum lagi. Ya, mudah-mudahan ke depan tidak terjadi ataupun kita minimalisasi perlakuan-perlakuan seperti ini.

Baik.

Berikutnya Pak Herviano, ada Pak Herviano? cukup?

Ada?

Silakan.

F-PDI PERJUANGAN (MOCHAMAD HERVIANO):

Terima kasih, Pak Ketua,

Bismillahirrahmanirrahim.

Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Selamat siang,

Salam sejahtera untuk kita semua.

Yang saya hormati Bapak Ketua, beserta seluruh Anggota Komisi V,
juga

Pak Menteri beserta seluruh jajaran,

h

Melanjutkan Pak Ketua, selamat, Pak, atas terpilihnya menjadi Anggota Dewan, *Insyah Allah* 2024, Pak, sama-sama lagi jadi nanti pindah ke kursi ini, Pak. Tentunya kami beserta Komisi V, terima kasih, Pak, atas mitra lima tahun ini. Mudah-mudahan ke depan Kementerian Desa semakin baik, dan tentunya poin-poin yang dapat kami sampaikan, Pak, terkait rencana kerja tahun 2025 ini, harapannya sesuai dengan judul rencana kerja pemerintah tahun depan: "Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan". Harapannya betul-betul pembangunan di desa ini, betul-betul berdasarkan judul tersebut, tidak hanya wacana. Artinya, target-target yang sudah ditetapkan, harus betul-betul tercapai maksimal.

Kami titip permasalahan kesejahteraan, kemiskinan, Pak. Statistika kemiskinan ekstrem, maupun kemiskinan bisa menjadi poin, salah satu poin utama dalam membuat Renstra, maupun RKA K/L di 2025 ke depan, apalagi juga masa perpanjangan kepala desa sudah diperpanjang, Pak. Harapannya, bisa menjadi *booster* untuk kinerja mereka bisa lebih optimal bersama-sama pendamping desa dan seluruh *stakeholder*. Saya hanya titip itu aja, Pak, terkait kemiskinan, betul-betul bisa dituntaskan berdasarkan potensi-potensi di desa masing-masing, maupun daerah tertinggal masing-masing, yang satu padu dengan rencana kerja pemerintah ke depan.

Saya kira tidak panjang-panjang, Pak, demikian karena nanti masih ada penajaman ya Pak Ketua di Eselon I. Sekali lagi, selamat Pak Menteri dan juga seluruh jajaran, selamat, semoga Allah Subhanahu Wata'ala meridhoi semua kinerja kita semua, *aamin ya rabbal alamin*.

Demikian.

Terima kasih, Pimpinan

*Wabillah taufik wal hidayah,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

KETUA RAPAT (IR. RIDWAN BAE/WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI/F-PG):

Walaikumsalam.

Terima kasih Pak Herviano.
Pak Tubagus?
Pak Hamka, silakan Pak Hamka.
Mau dikasih waktu 25 menit *ndak* apa-apa.

F-PG (DRS. HAMKA B KADY, M.S.):

Eggak, saya justru mau cepat.

Baik.
*Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

h

Pimpinan dan seluruh Anggota yang saya hormati,
Pak Dirjen, dan seluruh jajaran yang saya hormati pula,

Saya tidak banyak, Pak Menteri, karena memang saya tahu persis kondisi keuangan ini masih seperti begini-begini juga, belum ada perubahan. Di sisi lain, APBN kita tahun 2025 itu, naik kurang lebih 300 triliun. Jadi yang saya agak sedih dan heran, ada kenaikan 300 triliun dalam APBN, di sisi lain, kementerian seperti Kementerian Desa ini, malah berkurang anggarannya sama dengan PUPR, tapi okelah nanti kita lihat perkembangannya. Mudah-mudahan ada tambahan di pagu indikatif setelah pembahasan anggaran nanti di Badan Anggaran, yang mulai hari ini, mulai bergulir dan belum dibahas, hanya membahas mengenai laporan pertanggungjawaban Menteri Keuangan saja.

Nah, di dalam menghadapi anggaran tahun 2025, saya hanya menitipkan Pak Menteri ada berapa hal, yang pertama, kita coba mengevaluasi semuanya terhadap pendirian BUMDes, dan BUMDesma. Idenya sudah cerdas, tapi masih ada beberapa yang terjadi di daerah, yang tentu kita tidak harapkan sama-sama. Apa itu? banyak dana desa yang dianggarkan masuk sebagai modal penyertaan desa kepada BUMDes, itu yang menyebabkan anggaran desanya terkuras untuk penggunaan yang lain. *Nah*, apa yang ingin saya sampaikan di sini bahwa, mungkin ada petunjuk teknis dari Pak Menteri nanti, berapa besar sih dana desa yang bisa dialihkan menjadi modal kerja desa.

Saya dari Bogor kemarin, Pak Menteri, desa memberikan modal kepada, penyertaan modal kepada BUMDesnya itu 240 miliar, *eh* dua, *sorry*, 240 juta ya. Kendalanya adalah yang saya lihat struktur permodalannya itu, memang lebih utamanya berasal dari dana desa. Struktur modalnya, yang kelihatan di situ adalah, ada masalah antara apabila terjadi perubahan kepala desa, ada beberapa hal yang tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh kepala desa yang lain, yang menyebabkan beban kepada BUMDes yang berikutnya, ini banyak kejadian.

Nah, oleh karena itu, mungkin bisa diprogramkan pada tahun 2025 ini, utamanya dari inspektorat, kira-kira kita anggarankan untuk audit secara menyeluruh terhadap kinerja BUMDes yang telah dibantu oleh dana APBN dan modal kerja dari dana desa. Ini yang saya lihat tidak terbuku rapih, pemb..., apa namanya, pembukuannya tidak jelas, sehingga tidak bisa dipertanggungjawabkan dengan baik. Padahal ide pendirian BUMDes itu, sangat kita harapkan untuk menggerakkan ekonomi desa.

Ini barangkali yang ingin saya titipkan kepada Pak Menteri, dimana program ini bisa dilaksanakan, memungkinkan enggak bisa dilaksanakan, karena saya berharap bahwa BUMDes ini jangan sampai terjadi masalah sama pada zaman-zaman orde baru dulu. Orde Baru dulu, ada BUUD KUD akhirnya habis karena semua usaha mau dipegang. Padahal, sebenarnya BUMDes itu

tidak perlu terlalu banyak jenis usahanya, cukup untuk kepentingan ekonomi desa itu sudah bagus.

Saya kira ini titipan saya, Pak Menteri, nanti kita lihat anggarannya. Saya belum bisa membahas secara detail sekarang karena kita lihat mungkin mudah-mudahan ada perubahan ya, karena saya masih percaya bahwa mudah-mudahan nanti ada pergeseran-pergeseran lagi, sehingga ada pagu indikatif yang baru lagi.

Saya kira demikian saja, Pimpinan.

Terima kasih,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (IR. RIDWAN BAE/WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI/F-PG):

Walaikumsalam.

Makasih, Pak Hamka, bukan main penambahan anggaran belanja kita itu 300 triliun lebih ya? 300 triliun lebih kata Pak Hamka, Pak Hamka di Banggar juga memang dia.

F-PG (DRS. HAMKA B KADY, M.S.):

3.629

KETUA RAPAT (IR. RIDWAN BAE/WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI/F-PG):

Sementara PDT dari 4 triliun saja diminta, turun lagi tinggal 2 triliun lebih. Ya, nanti kita bertajam lagi di penajaman berikutnya lah.

Ibu Sarce ada tanggapan dari, cukup ya?

Baik Pak Menteri, mungkin sekarang Pak Menteri bisa memberikan jawaban, silakan Pak Menteri.

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DESA TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI RI (DR. (HC) DRS. A. HALIM ISKANDAR, M.PD.):

Terima kasih, Pak Ketua Rapat.

Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati,

Kalau Pak Hama sudah memberikan harapan akan ada perubahan, itu nampaknya ada angin segar karena yang bicara ini ahlinya.

Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati,

Secara umum, pertama saya ucapkan terima kasih atas seluruh masukan-masukan, utamanya yang terkait dengan peningkatan model pengawasan terhadap penggunaan dana desa. Menurut saya, ini sangat mendasar sekali dan ini PR yang memang harus terus kita benahi, karena ini tidak akan pernah berhenti karena dinamika pemanfaatan dana desa itu selalu cukup tinggi, maka pola pengawasan, pola pendampingan, itu juga harus mengikuti dinamika yang ada di lapangan.

Dan tentu berbagai hal yang terkait dengan sistem pengawasan ini memang harus dilakukan pembenahan, termasuk di dalamnya adalah regulasinya, regulasinya supaya betul-betul fokus, siapa *sih* yang berwenang total terhadap pengawasan, karena kalau seperti sekarang memang masih ada bias-bias, yang memang harus dilakukan penataan-penataan lebih lanjut.

Kemudian yang kedua, *focusing* terhadap program-program, supaya apa, berdampak. Menurut saya ini mutlak, dan saya mohon dengan sangat kepada jajaran birokrasi pada saat nanti *detailing* dengan Bapak-Ibu Pimpinan dan Anggota Komisi V, tolong betul-betul mempertimbangkan, dan menempatkan program-program sesuai dengan prioritas, jangan terlalu banyak *item*-nya, tapi enggak fokus.

Kemudian yang terkait juga dengan upaya penuntasan kemiskinan ekstrem khususnya, dan kesejahteraan warga masyarakat pada umumnya, itu adalah merupakan bagian dari keberadaan dana desa yang disalurkan secara langsung kepada desa. Sesuai dengan arahan Pak Presiden Jokowi pada awal saya dipanggil untuk mendapat tugas sebagai Menteri Desa, yang pertama adalah bagaimana dana desa betul-betul berdampak pada peningkatan ekonomi warga, itu berarti bicara kesejahteraan dan penurunan kemiskinan.

Yang kedua, dana desa betul-betul dirasakan kehadirannya oleh seluruh warga, bukan hanya oleh elit. Tentu ini juga menjadi catatan kita selama perjalanan lima tahun Kementerian Desa, terus kita lakukan monitoring, seberapa *sih* dampak keberadaan dana desa terhadap kesejahteraan dan penurunan kemiskinan.

Tentu, kita tidak bisa melaporkan dari sisi perspektif Kementerian Desa, karena kalau yang melaporkan Kementerian Desa pasti baik, tetapi dari

berbagai pengamatan dari pihak lain menunjukkan adanya peningkatan termasuk data statistik yang terjadi penurunan kemiskinan lebih, lebih signifikan dibanding perkotaan, dan ini juga butuh penanganan agak serius dengan penambahan masa kepala desa dari 6 tahun menjadi 8 tahun, dimana rentang waktu itu bisa berpengaruh kepada konsistensi kerja. *Nah*, di sini-lah juga tugas kita agar meskipun rentang waktunya tambah dari 6 tahun menjadi 8 tahun, semangat dan konsistensi kerja terus bisa dipertahankan oleh kepala desa dan perangkat desa.

Kemudian yang terkait dengan keberadaan BUMDes dan BUMDesma, terkait dengan pemanfaatan dana desa, saya sangat sepekat dengan saran dan masukan dari Pak Hamka agar ada pembatasan-pembatasan, paling tidak kalau tidak pembatasan, ada rasionalisasi. Tidak kemudian dibebaskan sedemikian rupa karena memang urusan BUMDes dan BUMDesa Bersama atau BUMDesma, ini masih harus terus dibenahi meskipun dari sistem pengawasan, dan sistem pelaporan, kita sudah menyiapkan banyak sekali instrumen yang dihasilkan dari kerja sama kita dengan lembaga akuntan publik, maupun dengan Sekolah Tinggi Akuntan Negara, sehingga sistem pelaporan, sistem pengawasan, sistem audit, itu sudah terbangun secara bagus, tinggal implementasinya yang kesemuanya itu kata kuncinya satu, yaitu sumber daya manusia.

Nah, oleh karena itu, menurut saya tepat apa yang disampaikan oleh Pak Hamka, perlu adanya rambu-rambu, rambu-rambu berapa, ukurannya apa, dana desa boleh disalurkan atau dimasukkan untuk permodalan BUMDesa atau BUMDesa Bersama.

Hal-hal lain yang terkait dengan *detailing* pemanfaatan pagu anggaran untuk 2025, nanti akan kita laporkan secara tertulis, dan tentu kita juga berharap agar segera dilakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi V dengan eksekutif supaya *detailing*-nya bagus, dan pada saatnya kita bertemu lagi untuk penetapan APBN 2025.

Saya kira demikian.

Terima kasih,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

F-PG (DRS. HAMKA B KADY, M.S.):

Izin, izin mau.

KETUA RAPAT (IR. RIDWAN BAE/WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI/F-PG):

Silakan Pak Hamka, silakan.

F-PG (DRS. HAMKA B KADY, M.S.):

Saya *ndak* lanjut Ketua, mau bergeser dulu, izin, makasih.

KETUA RAPAT (IR. RIDWAN BAE/WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI/F-PG):

Ke Banggar lagi, makasih Pak Hamka, tadi Beliau lagi di Banggar, saya panggil karena kita kurang orang di sini ya, ya Pak Aras juga mau pamit ke Banggar.

Silakan Pak, silakan.

Baik.

Sekarang kita masuk pada kesimpulan, draf kesimpulannya ada? tolongayangkan.

Draf Kesimpulan Rapat Kerja Komisi V DPR RI dengan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) dan Transmigrasi.

27 Agustus 2024

1. Komisi V DPR RI memahami penjelasan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi terhadap alokasi anggaran Kementerian dalam APBN tahun anggaran 2025 berdasarkan Surat Bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan RI Nomor: sekian dan sekian, hal: Pagu Anggaran Belanja Kementerian/ Lembaga dan Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2025 dan Penyelesaian Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun 2025, sebagai berikut:

a. Pagu kebutuhan sebesar Rp4.379.570.000.000,00 sementara nota keuangan RAPBN tahun anggaran 2025 adalah sebesar Rp2.314.806.849.000,00 selisihnya adalah 2 triliun lebih.

Selanjutnya, Komisi V DPR RI bersama dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, akan memperjuangkan kenaikan anggaran sesuai pagu kebutuhan melalui mekanisme pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang APBN Tahun Anggaran, tentang APBN di DPR RI

2. Komisi V DPR RI Meminta Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi agar:

a. Menyesuaikan alokasi pagu anggaran tahun anggaran 2025 sesuai dengan usulan dan saran Komisi V DPR RI;

b. Menambah alokasi anggaran untuk bantuan pengembangan BUMDes dan desa wisata;

c. Evaluasi dan audit BUMDes untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangannya;

d. Penyusunan sistem dan indikator pelaporan pengawasan dana desa.

Bagaimana Anggota Komisi V yang terhormat, sepakat ya?

ANGGOTA KOMISI DPR RI:

Sepakat.

KETUA RAPAT (IR. RIDWAN BAE/ WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI/F-PG):

**(RAPAT: SETUJU)
(KETOK PALU 1 KALI)**

Pak Menteri?

**MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN
TRANSMIGRASI RI (DR. (HC) DRS. A. HALIM ISKANDAR, M.PD.):**

Siap, sepakat.

KETUA RAPAT (IR. RIDWAN BAE/WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI/F-PG):

Sepakat ya? Ya, baik, kalau demikian kita ketok palunya.

**(RAPAT: SETUJU)
(KETOK PALU 1 KALI)**

Baik.

Pimpinan Anggota Komisi V DPR RI dan Menteri Desa PDT dan Transmigrasi yang kami hormati,

Dengan disepakati kesimpulan keputusan tersebut, maka rangkaian acara rapat kerja pada hari ini telah kita selesaikan.

Kami mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan selama berlangsung rapat.

Sebelum rangkaian acara rapat kami tutup, kami berikan kesempatan kepada Menteri Desa PDT dan Transmigrasi untuk menyampaikan sambutan penutup.

Kami persilakan, Pak.

**MENTERI DESA PDT DAN TRANSMIGRASI RI (Dr. (HC) Drs. A. HALIM
ISKANDAR, M.Pd.):**

Terima kasih, Pak Ketua,

Para Pimpinan, Anggota Komisi V,

Sekali lagi atas nama pribadi, maupun atas nama Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Transmigrasi mengucapkan terima kasih atas seluruh arahan, sinergitas, dan kebersamaan kita yang kita bangun dengan sangat bagus selama perjalanan pemerintahan periode ini, dan mudah-mudahan fase yang terakhir nanti bisa kita jalani dengan sebaik-baiknya, terima kasih,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (IR. RIDWAN BAE/WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI/F-PG):

Makasih, Pak Menteri.

Kita masih sekali lagi kita rapat penetapan nantinya dengan Pak Menteri, di akhir masa periode Pak Menteri di kabinet ini, tapi mudah-mudahan Pak Menteri masih tetap jadi menteri lagi.

Baik.

Saya juga atas nama Pimpinan Anggota Komisi V DPR RI, mohon maaf bila ada hal yang tidak berkenan selama berlangsungnya rapat ini dan kita akhiri rapat ini dengan ucapan *wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh*.

**(RAPAT DITUTUP PUKUL 14.20 WIB)
(KETOK PALU 3 KALI)**

Jakarta, 27 Agustus 2024

a.n. **KETUA RAPAT
SEKRETARIS RAPAT,**

TTD.

NUNIK PRIHATIN BUDIASTUTI, S.H.

NIP. 196912021998032002

h